

# IDENTIFIKASI DERAJAT KOMPETISI FISKAL KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

## *IDENTIFICATION DEGREES OF FISCAL COMPETITION IN EAST JAVA MUNICIPALITIES*

**Bintang Dwitya Cahyono**  
Pusat Penelitian Ekonomi  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

### **Abstrak**

Desentralisasi fiskal telah diterapkan oleh Indonesia semenjak tahun 2001. Sistem desentralisasi menuntut daerah untuk lebih mandiri dan kreatif dalam mengelola kebijakan fiskal daerah. Strategi daerah dalam mengelola fiskal daerah telah menimbulkan sebuah kompetisi fiskal antar daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar derajat kompetisi fiskal kabupaten/ kota di Jawa Timur dengan membagi menjadi lima koridor ekonomi; (1) Koridor Timur; (2) Koridor Tengah; (3) Koridor Barat Daya; (4) Koridor Barat; dan (5) Koridor Kepulauan. Dengan menggunakan pendekatan *Fuzzy Logic* diketahui bahwa Koridor Tengah memiliki derajat kompetisi fiskal tertinggi di Jawa Timur.

**Kata Kunci:** *Desentralisasi fiskal, Kompetisi Fiskal, Fuzzy Logic*

### **Abstract**

*Fiscal decentralization has been implemented by Indonesian's government since 2001. Decentralized system encourage local governments/ municipality to be more independent and creative in managing fiscal policy in their regions. The interaction of fiscal policy strategy in the region caused fiscal competition between regions. The purpose of this study is to measure the degree of fiscal competition amongs local governments in East Java divided into five economic corridors: (1) Eastern Corridor, (2) Central Corridor, (3) Southwest Corridor, (4) West Corridor; and (5) Corridor Islands. By using the Fuzzy Logic approach, the study found that the Central Corridor has the highest degree of fiscal competition in East Java.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Fiscal Competition, Fuzzy Logic*

## **PENDAHULUAN**

Peran pemerintah dalam perekonomian berbeda-beda sesuai dengan sistem perekonomian yang dianut. Pada sistem ekonomi komando, pemerintah berperan sangat dominan dalam perekonomian, dimana seluruh kebijakan mengenai ekonomi dan sosial diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Di sisi lain peranan pemerintah berlaku sebaliknya dalam sistem ekonomi pasar, sistem tersebut menyerahkan hampir seluruh kebijakan ekonomi kepada pasar/ masyarakat.

Desentralisasi sistem pemerintahan telah muncul sebagai paradigma baru dalam pembuatan berbagai kebijakan dan administrasi pembangunan sejak era 1970-an. Perhatian besar terhadap era desentralisasi tidak hanya disebabkan oleh kegagalan sistem perencanaan terpusat (sistem

komando) terhadap program pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah, tetapi juga munculnya kesadaran pemerintah pusat akan peran penting pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan oleh pemerintah pusat.

Lebih jauh dalam konteks negara berkembang, Hidayat (2005) menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa sebagian besar negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal, yaitu: i) untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, ii) untuk memperluas otonomi daerah, dan iii) sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Sejalan dengan

hal tersebut, tujuan otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi tersebut ditujukan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik dengan cara demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat agar lebih baik. Dengan adanya kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka diharapkan tujuan pembangunan ekonomi dengan sasaran akhir penciptaan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik (*public services*) yang lebih efisien dari pemerintah daerah (UNDP, 2009). Untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut, pelaksanaan desentralisasi ditetapkan pada tiga aspek utama, yakni: 1) desentralisasi politik; 2) desentralisasi administratif, dan 3) desentralisasi fiskal.

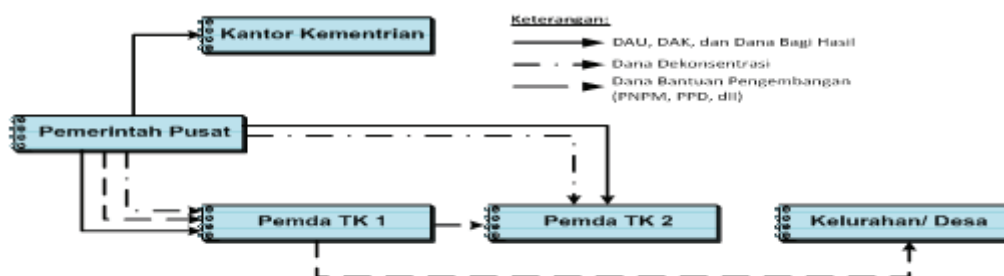
Ketiga desentralisasi tersebut diatur dalam undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur aspek pemerintahan daerah dan juga dana perimbangan pusat dan daerah (lihat Gambar 1.1). Dalam UU tersebut diatur secara tegas mengenai

mekanisme pembagian kekuasaan/ wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Selain pemberian wewenang dalam hal administratif pemerintahan, kebijakan ini diikuti pula dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Mardiasmo, 2009).

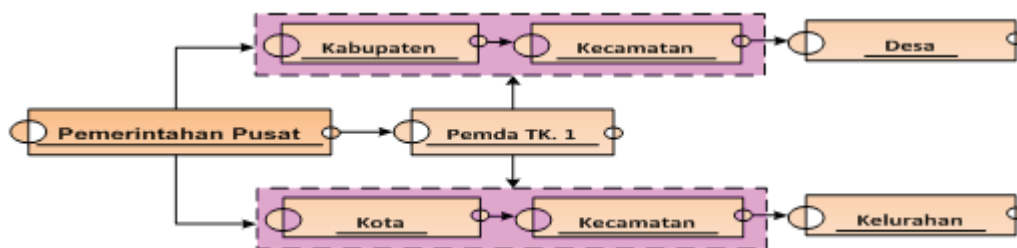
Meskipun demikian tidak seluruh kebijakan tata kelola pemerintahan baik aspek administratif, politik dan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat tetap ikut andil dalam urusan pemerintahan daerah. Sebagai contoh, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme transfer keuangan berupa dana perimbangan, dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU). Lebih lanjut melalui kantor kementerian, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran bagi daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Sukartini, 2010).

Terkait dengan penjelasan di awal, hal terpenting dari tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mendorong daerah agar lebih mandiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dalam konteks ini daerah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri dengan meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD).

Gambar 1. Hirarki Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah dan Pengolahan Tata Pemerintahan



Sumber: UU No. 32 dan 33 Tahun 2004



Sumber: UU No. 32 Tahun 2004

Indikator kemandirian daerah ditinjau dari sisi penerimaan fiskal adalah dengan semakin berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat baik berupa DAU maupun DAK.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam mengatur dan menjalankan roda perekonomian agar dapat menjadi daerah yang mandiri. Setiap kebijakan pemerintah daerah baik bersifat administratif ataupun kebijakan keuangan (fiskal) diharapkan dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan perekonomian daerah. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah daerah dalam perbaikan layanan publik (*public services*) ataupun pengembangan/ perbaikan infrastruktur.

Hal menarik untuk dikaji dalam era desentralisasi fiskal yang telah berjalan kurang-lebih selama 10 tahun, adalah cara pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan anggarannya, di mana daerah diberi kewenangan dalam mengelola kebijakan anggaran daerah sehingga memungkinkan terjadinya interaksi kebijakan fiskal antar daerah (Solihin, 2007). Fenomena interaksi kebijakan fiskal antar daerah pada akhirnya menimbulkan kompetisi fiskal antar daerah. Interaksi kebijakan fiskal daerah biasa terjadi pada daerah yang memiliki faktor kedekatan secara geografis dengan daerah lain ataupun terdapat kemiripan struktur perekonomian antar daerah (Rosen, 1993).

*Fiscal competition* didefinisikan sebagai persaingan kebijakan antar pemerintahan dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan dimasing-masing daerah pemerintahan. *Fiscal competition* ini terjadi pada ranah kebijakan publik menyangkut aspek pengeluaran/ belanja dan pendapatan/ perpajakan pemerintah (Ogawa, 2010). Lebih jauh kebijakan/ strategi masing-masing pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah telah menimbulkan kompetisi dalam konteks kebijakan fiskal (*fiscal competition*) antar daerah. Akibat dari persaingan kebijakan fiskal (*fiscal competition*) tersebut mendorong perubahan/ pergerakan dari faktor produksi, seperti pergerakan migrasi penduduk ataupun pergerakan arus investasi/ modal, dari daerah satu ke daerah lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat kompetisi fiskal kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur dengan memasukkan variabel pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah, makro ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur sebagai *proxy*, sehingga dapat diketahui seberapa besar derajat kompetisi fiskal yang terjadi Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

Terminologi desentralisasi pada hakekatnya tidak hanya memiliki satu makna. Desentralisasi dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara/ daerah. Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian berubah menjadi UU No. 33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Ini artinya desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dan tanggung jawab akan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam era desentralisasi, daerah diberikan kebebasan terbatas untuk menentukan sendiri kebijakan fiskal, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi kebijakan fiskal antar daerah. Interaksi tersebut dapat terjadi mengingat faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, barang dan jasa, dapat berpindah tanpa ada halangan. Perpindahan faktor produksi tersebut mengikuti pola intensif dan disintensif dari kebijakan pemerintah (Alves, 2005). Kebijakan

pemerintah daerah yang bersifat disintensif bagi faktor produksi, memungkinkan faktor produksi tersebut berpindah ke daerah lain. Demikian pula sebaliknya, jika kebijakan pemerintah daerah bersifat intensif, maka akan mendorong faktor produksi untuk masuk ke daerah tersebut.

Salah satu instrumen yang digunakan di dalam kompetisi fiskal adalah kebijakan anggaran. Dalam konteks kompetisi fiskal, masing-masing daerah menggunakan instrumen kebijakan anggaran melalui pengeluaran pemerintah dan pajak daerah. Semakin ekspansif suatu kebijakan anggaran pemerintah daerah akan menyebabkan semakin banyak faktor produksi masuk ke daerah tersebut. Dengan demikian perekonomian suatu daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya faktor produksi yang masuk (Bucovetsky, 2005).

Menurut Breton (1996a), kompetisi pemerintah dapat terjadi pada seluruh tingkat pemerintahan. Kompetisi tersebut bisa saja terjadi antar pemerintahan negara ataupun antar pemerintah daerah. Lebih jauh dalam model persaingan tersebut tiap-tiap pemerintah daerah selalu berusaha untuk memaksimalkan strategi/kebijakan diantara keterbatasan (*constraint*). Tingkat persaingan antar pemerintah tersebut dibatasi dengan asumsi bahwa tiap-tiap pemerintah memiliki derajat kekuatan seimbang (tidak timpang)

*Expenditure competition* adalah bentuk persaingan antar pemerintah dalam hal pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk memperebutkan faktor produksi. Semakin banyak faktor produksi masuk suatu daerah menyebabkan pertumbuhan perekonomian semakin cepat dan tinggi, dan secara otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan meningkat seiring dengan hal tersebut.

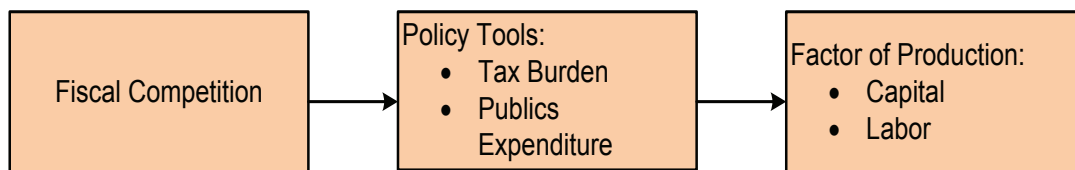
*Expenditure competition* adalah bentuk persaingan antar pemerintah dalam hal pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk memperebutkan faktor produksi. Semakin banyak faktor produksi masuk suatu daerah menyebabkan pertumbuhan perekonomian semakin cepat dan tinggi, dan secara otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan meningkat seiring dengan hal tersebut.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu komponen kebijakan fiskal dengan tujuan untuk menstimulus segala kegiatan perekonomian, baik untuk belanja modal maupun belanja rutin mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pengeluaran pemerintah suatu daerah dengan tujuan menciptakan barang/ jasa tidak hanya dinikmati oleh penduduk di daerah tersebut, tetapi penduduk di sekitar daerah tersebut juga dapat menikmatinya. Secara garis besar, kompetisi pengeluaran antar pemerintah pada hakekatnya akan menyebabkan terjadinya eksternalitas/spillover (Wildasin, 2001).

Pengertian *tax competition* adalah bentuk kompetisi antar pemerintah bertujuan untuk memperebutkan objek pajak baik berupa barang/ jasa dan tenaga kerja (Hauptmiere, 2009). Strategi/kebijakan masing-masing pemerintah dibidang perpajakan akan berpengaruh terhadap pergerakan faktor produksi (modal dan tenaga kerja). Pada tataran ini pemerintah akan berusaha untuk menurunkan sekecil mungkin tarif pajak sehingga dapat menarik faktor produksi agar masuk ke dalam daerah pemerintahannya. Peningkatan arus faktor produksi selanjutnya akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak yang dipungut.

Pada dasarnya *tax competition* dibagi menjadi dua model pendukung, yakni: 1) model *tax competition* dan 2) model *tax coordination*.

Gambar 2. Instrumen Kebijakan dalam Kompetisi Fiskal



Sumber: Robson, 2001

Dalam model *tax competition* masing-masing daerah akan saling bersaing dengan daerah lainnya. Sedangkan dalam model *tax coordination* masing-masing daerah justru bekerja sama dalam merumuskan kebijakan perpajakan untuk menghasilkan sebuah formulasi perpajakan yang saling menuntungkan.

Menurut Justmant (2001) kompetisi fiskal bidang perpajakan (*tax competition*) dapat menyebabkan terjadinya kerusakan (*destructive competition*). *Destructive competition* terjadi apabila ke dua daerah terlalu berlarut-larut dalam persaingan, sehingga *game* dari ke dua daerah tersebut adalah penetapan pajak yang terlalu rendah. Implikasi dari persaingan berlarut-larut tersebut adalah daerah akan kekurangan sumber pembiayaan yang berasal dari sektor pajak, sehingga berdampak pada kesulitan pemenuhan kebutuhan suatu daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif analisis dan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode matematika deterministik, yakni logika samar (*fuzzy logic*). Metode matematika *fuzzy logic* digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kompetisi fiskal di kabupaten/ kota Jawa Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni: 1) data untuk analisis deskriptif, dan 2) data untuk analisis model. Untuk analisis deskriptif penelitian ini menggunakan data di tahun 2006 sampai dengan 2008. Selanjutnya data untuk analisis model *fuzzy* menggunakan data di tahun 2008.

Penelitian ini melingkupi tiga jenis indikator yang digunakan dalam mengukur kompetisi fiskal kabupaten/ kota di Jawa Timur, yakni: bidang

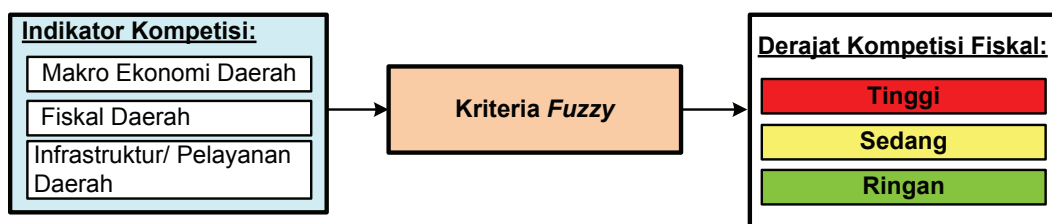
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, serta infrastruktur/ pelayanan publik (Hauptmiere, dkk; 2008). Adapun indikator tersebut adalah: (1) indikator makro ekonomi daerah; (2) indikator fiskal daerah; dan (3) indikator infrastruktur/ pelayanan publik, kemudian dari masing-masing indikator tersebut dibagi lagi menurut variabel pembentuknya. Untuk indikator makro ekonomi daerah, variabel pembentuknya adalah: produk domestik regional bruto PDRB nominal. Untuk indikator fiskal daerah, variabel pembentuknya adalah: (1) pendapatan dari dana perimbangan; (2) pendapatan dari dana non-perimbangan; (3) belanja langsung; dan (4) belanja tidak langsung. Lebih lanjut untuk indikator pelayanan publik, variabel pembentuknya adalah: (1) rasio jumlah guru dibagi seluruh jumlah siswa; (2) rasio jumlah penduduk dibagi jumlah seluruh tenaga medis; dan (4) rasio panjang jalan dengan kualitas baik dibagi dengan total panjang jalan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah dijelaskan di awal, bahwa kompetisi fiskal didefinisikan sebagai persaingan kebijakan antar pemerintah dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat di masing-masing daerahnya. Ranah kompetisi kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni: 1) kompetisi dalam bidang perpajakan dan 2) kompetisi dalam bidang pengeluaran.

Pada kabupaten/ kota di Jawa Timur, dengan melakukan analisis secara parsial (pembagian menurut koridor) di ketahui bahwa besaran derajat kompetisi fiskal antar koridor berbeda-beda. Koridor dengan derajat kompetisi terbesar adalah Koridor Tengah, yakni sebesar 0,856. Posisi kedua yakni Koridor Barat Daya (0,53) dan di urutan berikutnya yakni Koridor Timur (0,503), Barat (0,486), dan Kepulauan (0,356).

Gambar 3. Kinerja Model *Fuzzy*



Tabel 1 Indeks Fuzzy Model Kompetisi Fiskal, Tahun 2008 (%)

Koridor	Indeks Kompetisi Fiskal	Status
Timur	0.503	rendah
Tengah	0.856	tinggi
Barat Daya	0.53	menengah
Barat	0.486	rendah
Kepulauan	0.356	rendah

Sumber: hasil perhitungan

Hasil perhitungan Tabel 1 menunjukkan kompetisi fiskal terbesar berada pada kawasan/ Koridor Tengah. Hal ini menjadi wajar, karena kegiatan perekonomian cenderung terkluster di sekitar daerah Surabaya. Demikian pula ditinjau dengan ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur dan pelayanan publik pada Koridor Tengah cenderung lebih maju dibandingkan dengan lainnya. Dengan semakin lengkapnya fasilitas secara tidak langsung akan mendorong faktor produksi (tenaga kerja dan kapital) untuk masuk ke daerah tersebut.

Selanjutnya koridor yang memiliki indeks kompetisi terbesar kedua adalah Barat Daya. Dalam koridor tersebut kompetisi fiskal dimotori oleh Kota Kediri yang memiliki PAD, belanja daerah tertinggi dan tingkat ketersediaan infrastruktur yang memadai. Akibat hal tersebut, Koridor Barat daya memiliki jumlah kepadatan penduduk relatif tinggi, yakni tertinggi kedua setelah koridor tengah.

Nilai indeks kompetisi fiskal Koridor Timur daya hampir mirip dengan indeks kompetisi fiskal di Koridor Barat Daya (lihat Tabel 1). Kedua koridor tersebut terletak di sekitar Koridor Tengah, dimana menurut Martincus (2004b), faktor kedekatan wilayah dengan pusat kutub pertumbuhan (*growth pole*) turut mempengaruhi besarnya derajat kompetisi.

Sementara itu, hasil perhitungan model kompetisi fiskal menunjukkan bahwa Koridor Kepulauan yang terdiri dari empat kabuapaten di Pulau Madura, memiliki nilai indeks kompetisi fiskal yang rendah. Rendahnya tingkat kompetisi fiskal disebabkan oleh rendahnya input faktor dalam koridor ini. Kemudian secara ekonomi, Koridor Kepulauan merupakan daerah yang

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi terendah jika dibandingkan dengan lainnya. Keterbelakangan perekonomian di kawasan tersebut dikarenakan struktur perekonomian yang masih mengandalkan kontribusi sektor primer. Lebih jauh ditinjau dari segi pendidikan, koridor tersebut merupakan kawasan dengan tingkat pendidikan terendah bila dibandingkan dengan koridor lain.

Tinggi atau rendah indeks kompetisi fiskal sangat dipengaruhi oleh besaran input yang digunakan dalam model. Hasil analisis menunjukkan bahwa, koridor dengan nilai indeks fiskal rendah pasti memiliki nilai indeks penerimaan daerah, belanja daerah, dan makroekonomi rendah. Penerimaan asli daerah dapat digali lebih dalam dengan memaksimalkan penerimaan PAD. Salah satu upaya paling nyata adalah dengan selalu melakukan pengawasan terhadap penerimaan daerah, supaya tidak terjadi kebocoran penerimaan. Lebih jauh, usaha meningkatkan PAD dengan menaikkan tarif pajak tetap harus mengikuti kriteria perpajakan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Minimnya kemampuan aparatur daerah dalam menentukan prioritas belanja daerah turut mempengaruhi besar/ kecil rasio belanja langsung. Perencanaan penganggaran daerah harus disusun sesuai dengan rencana pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang dan demikian pula dengan kecepatan penyerapan anggaran belanja yang harus tepat waktu sehingga tidak menghasilkan sisa lebih anggaran (Silpa).

Lebih jauh menurut Wildasin (1998) secara tidak langsung akibat adanya kompetisi fiskal antar daerah, justru menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dan distribusi. Kompetisi fiskal menyebabkan faktor produksi hanya mengalir pada suatu daerah, akibatnya daerah lain akan kekurangan faktor produksi. Akan tetapi Aziz (1985) dalam mengkritisi teori pengelompokan modal, mengungkapkan bahwa pengelompokan modal di suatu daerah hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, modal justru akan bergerak keluar dari daerah kaya menuju daerah kekurangan modal. Akibat dari pergerakan tersebut maka dalam jangka panjang tingkat produktivitas daerah kaya modal maupun kurang modal akan seimbang.

Sehingga akibat adanya keseimbangan aliran modal tersebut membuat disparitas antar wilayah akan semakin berkurang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Hasil perhitungan sub-blok model indeks fiskal daerah untuk tiap koridor menunjukkan bahwa sebagian besar koridor ekonomi memiliki nilai indeks yang rendah (kecuali Koridor Tengah). Rendahnya indeks tersebut dipengaruhi oleh input persamaan model, yakni penerimaan (PAD) dan pengeluaran daerah (untuk belanja langsung) yang rendah.
2. Hasil perhitungan sub-blok model indeks infrastruktur daerah untuk tiap koridor menunjukkan hasil yang serupa dengan model indeks fiskal. Sebagian besar koridor memiliki nilai rendah (kecuali koridor tengah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang baik dan lengkap hanya terletak di kabupaten/ kota Koridor Tengah.
3. Hasil perhitungan model simultan indeks kompetisi fiskal menunjukkan bahwa koridor tengah memiliki derajat kompetisi fiskal tertinggi, kemudian disusul oleh Koridor Barat Daya, Timur, Barat, sedangkan indeks kompetisi fiskal terendah adalah Koridor Kepulauan. Tingginya indeks kompetisi fiskal pada Koridor Tengah menyebabkan pergerakan faktor produksi terpusat di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Agnès Bénassy-Quéré., Nicolas Gobalraja., dan Nicolas Gobalraja. 2005. Tax and Public Input Competition. Université Paris X.

Alves, Pinheiro. 2005. The Standar Neo-Classical View on Tax Competition. Working Paper 12568. NBER. Cambridge.

Ananda, Fajri C. 2010. Restorasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Pengalaman Jawa Timur). Pidato

Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang: Brawijaya University Press.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. Statistik Keuangan Kabupaten/ Kota.

Bahl, Roy W., dan Linn, Johannes. 1992. Urban Public Finance in Developing Countries. New York: Oxford University Press.

Becsi, Zsolt. 1998. Fiscal Competition and Reality: A Time Series Approach. Working Paper 98-19. Federal Reserve Bank of Atlanta.

Breton, A., 1996. Competitive Government: An Economic Theory of Politics and Public Finance. Cambridge: Cambridge University Press.

Caldeira, Emilie., dan Foucault, Martial. 2010. Decentralization in Africa and Fiscal Competition Evidence from Benin. Center of Interuniversitaire de Recherche end Analyse des Organizations. Canada.

Cox, Earl. 1994. The Fuzzy System Handbook (A Practitioner's Guide to Building, Using, and Maintaining Fuzzy System). USA: Massachusetts Academic Press.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan RAPBN 2010.

Ermini, Barbara., dan Santolini, Raffaella. 2006. Horizontal Interaction on Local Councils Expenditures: Evidence from Italy. Società Italiana di Economia Pubblica: Italy.

Gelly, Ned., dan Jang, Roger. 2000. *Fuzzy Logic Toolbox*. Mathwork, Inc: USA.

Guney, K., dan Sarikaya, N. 2009. "Comparison of Mamdani and Sugeno Fuzzy Inference System Models for Resonant Frequency Calculation of Rectangular Microstrip Antennas". *Progress In Electromagnetics Research B*. Vol. 12. Department of Electrical and Electronics Engineering. Erciyes University: Turkey.

Hidayat, Syarif. 2010. Mengurai Peristiwa Merentas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah". *Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*. Volume 29. Juli. Jakarta: LP3ES.

\_\_\_\_\_. 2003. State-Society Relation: Rekonstruksi Konsep dan Pendekatan

- Kebijakan, Dalam: *Otonomi Daerah dalam Perspektif*. Jakarta: P2E-LIPI.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Too Much Too Soon: Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Justman, M., dan T. van Ypersele. 2001. Fiscal Competition and Regional Differentiation. *Journal of Urban Economics*. Volume 52.
- Kessler, Anke S., Lulfesmann, Christoph., dan Myers, Gordon M. 2001. Redistribution, Fiscal Competition, and the Politics of Economic Integration. *Journal of Public Economics*. Volume 23.
- Khusaini, Mohammad, 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusumadewi, Sri., dan Purnomo, Hari. 2010. *Aplikasi Metode Fuzzy untuk Pendukung Keputusan*. Edisi Dua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Litvack, Jennie. 1999. *Decentralization*. Washington, DC: World Bank.
- Mahi, Raksaka. 2002. *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah. Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV*. LEMHANAS: Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2008. *Ekonomi Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Macroeconomics*. Sixth Edition. New York: Worth Publisher.
- Mardiasmo. 2009. *Kebijakan Destralisasi Fiskal Di Era Reformasi: 2005-2008*. Dalam: *Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep dan Implementasi)*. Jakarta: Gramedia-Kompas.
- Martincus, Christian Volpe. 2004. *Do Economic Integration and Fiscal Competition Help to Explain Location Patterns?*. University of Bonn.
- Musgrave, Richard A. 1997. *Devolution, Grants, and Fiscal Competition*. *Journal of Economic Perspectives*. Volume 11.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Fifth Edition. Singapore: McGraw-Hill.
- United Nation Development Programme - Indonesia. "The Missing Link: The Province and Its Role in Indonesia's Decentralization". Policy Issues Paper. Mei 2009.
- Rainald Borck., Marco Caliendo., dan Viktor Steiner. 2006. *Fiscal Competition and The Composition of Public Spending: Theory and Evidence*. Discussion Paper No. 2428. Institute for the Study of Labor. German.
- Rosen Harvey., dan Anne Case. 1993. *Budget Spillover and Fisca Policy Interdependence*. *Journal of Public Economics*. Nort Holland
- Sebastian Hauptmeier., Ferdinand Mittermaier., dan Johannes Rincke. 2009. *Fiscal Competition Over Taxes and Public Inputs*. Working Paper No. 1033. European Central Bank. German.
- Scholar Pedia. 2011. "Fuzzy Control, (Online)". Diunduh dari ([http://www.scholarpedia.org/article/Fuzzy\\_logic](http://www.scholarpedia.org/article/Fuzzy_logic), tanggal 17 Juli 2011).
- Siddik, Machfud, 2009. *Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999 - 2004*. Dalam: *Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep dan Implementasi)*. Jakarta: Gramedia-Kompas.
- Sukartini, Made. 2010. *Does General Allocation Fund for Good Government or Lucky One?*. Indonesia Regional Science Association (IRSA).
- Wildasin, David E. 2001. *Fiscal Competition in Space and Time*. Martin School of Public Policy: University of Kentucky. Lexington: USA.
- World Bank. 2005. *Fiscal Sustainability in Theory and Practice: A Handbook*. Washington: World Bank.